

INTISARI

Peranan Dinas Sosial Kota Yogyakarta pada Proses Pengawasan Pengangkatan Anak Secara Langsung Sebagai Bentuk Mewujudkan Perlindungan dan Kesejahteraan Anak.

Oleh: Matheus Lumban Raja,¹ Rizky Septiana Widyaningtyas.²

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pengangkatan Anak menegaskan bahwa tujuan dari Pengangkatan Anak adalah demi kepentingan terbaik bagi anak. Penelitian ini akan meninjau sejauh mana Peran Dinas Sosial Kota pada proses pengawasan Pengangkatan Anak, di mana bentuk dari pengawasan tersebut bagian dari upaya untuk melindungi dan mensejahterakan anak. Penelitian ini dilakukan dengan metode normatif empiris, di mana menganalisa berdasarkan mencermati data sekunder dan menghubungkannya dengan data primer.

Pelaksanaan proses Pengangkatan Anak secara langsung melalui berbagai macam tahapan. Tahapan pertama, yakni Calon Orang Tua Angkat telah atau sudah melakukan pengasuhan anak dengan Calon Anak Angkat minimal selama 6 bulan. Selama pengasuhan tersebut, merupakan modal bagi Dinas Sosial Kota Yogyakarta untuk menggali keterangan tentang kelayakan dari Calon Orang Tua Angkat

Dinas Sosial Kota Yogyakarta berperan terbatas pada pemberian rekomendasi tentang kelayakan Calon Orang Tua Angkat dan Calon Anak Angkat tersebut. Rekomendasi tersebut dilaksanakan pada proses pengawaasan berkas secara adminitrasi dan melakukan kunjungan rumah. Keterbukaan dari Calon Orang Tua Angkat akan mempermudah kerja Dinas Kota Yogyakarta dalam menggali keterangan yang selengkapnya, sehingga harapannya rekomendasi yang akan dikeluarkan nanti, merupakan rekomendasi yang tepat.

Kata Kunci: Pengawasan, Pengangkatan Anak secara langsung, Perlindungan dan kesejahteraan anak.

¹ Mahasiswa strata satu (S-1) pada Departemen Hukum Adminitrasi Negara di Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

² Staf Pengajar Hukum Adminitrasi Negara, Fakultas Hukum Univeristas Gadjah Mada, Yogyakarta.

ABSTRACT

The role of social service of Yogyakarta in the direct child lifting supervision process as a form of realizing child protection and welfare.

By: Matheus Lumban Raja,³ Rizky Septiana Widyaningtyas.⁴

Government Regulation No. 54 year 2007 on child adoption confirms that the purpose of child adoption is in the best interest for the child. This study will review the extent of the city's social service role in the child adoption supervision process, where the form of supervision is part of the effort to protect and enrich the child. This research is done by the empirical normative method, where it analyzes based on secondary data and connects it with primary data.

Implementation of the child adoption process directly through various stages. First stage, believe prospective foster parents have been or have been doing child care with prospective foster children for at least 6 months. During the caregiving, it is a capital for the social service of Yogyakarta City to explore the eligibility of prospective foster parents

The social service of Yogyakarta is limited to providing recommendations on the eligibility of the candidate for foster parents and the prospective adopted child. The recommendation is implemented in the process of preserving the file administration and making a home visit. Openness from prospective foster parents will facilitate the work of Yogyakarta City office in digging more information, so hopefully the recommendations that will be described later, is the right recommendation.

Keywords: supervision, direct child lifting, protection and welfare of children.

³ Mahasiswa strata satu (S-1) pada Departemen Hukum Administrasi Negara di Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

⁴ Staf Pengajar Hukum Administrasi Negara, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.